

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan mengetahui peran, kendala yang dihadapi, dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi dari MPPD Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT di Kabupaten Sleman.

Penelitian hukum ini berjenis yuridis empiris dengan pokok kajian berupa implementasi ketentuan hukum positif di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan cara pengumpulan data melalui penelitian lapangan terhadap responden dari unsur yang melakukan pembinaan dan pengawasan (MPPD Kabupaten Sleman) dan responden yang menerima pembinaan dan pengawasan (PPAT Kabupaten Sleman) dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disampaikan dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT di Kabupaten Sleman masih belum maksimal. Peran dari MPPD Kabupaten Sleman dalam pembinaan dan pengawasan hanya sebatas membantu Kepala Kantor Pertanahan jika ditugaskan. Pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Sleman masih belum maksimal dikarenakan adanya kendala internal (kesulitan koordinasi, minimnya dana operasional dan perbedaan persepsi atas suatu regulasi yang ada) dan kendala eksternal (tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran beberapa PPAT Kabupaten Sleman terhadap peratruan dan kode etik yang masih belum baik).

Kata Kunci: Pembinaan, Pengawasan, Jabatan, PPAT, Kabupaten Sleman

ABSTRACT

This research tried to examine, study, and find out the role, obstacles that are encountered, and efforts to overcome the obstacles that are faced by the Sleman Regency MPPD in the implementation of guidance and supervision of the implementation of PPAT office in Sleman.

This type of legal research is empirical juridical with the subject of the research is the implementation of positive legal provisions in the community. This research is descriptive by collecting data through field research on respondents that are people that provide guidance and supervision (Sleman Regency MPPD) and respondents who receive guidance and supervision (Sleman Regency Land Deed Official) and library research. The data that were obtained were then analyzed and delivered using qualitative methods.

The results of this study indicate that the guidance and supervision of the implementation of PPAT office in Sleman is still not optimal. The role of the Sleman Regency MPPD in guidance and supervision are limited to assisting the Head of the Land Agency if they are assigned. Guidance and supervision in Sleman Regency are still not maximal due to internal obstacles (difficulty in coordination, lack of operational funds and differences in perception of existing regulations) and external constraints (level of understanding and level of awareness of some PPATs in Sleman on regulations and codes of ethics that are still not good).

Keywords: Guidance, Supervision, Office, PPAT, Sleman